



SALINAN

**BUPATI INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU
NOMOR 20 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 3347/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Indragiri Hulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan...

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024 Nomor 3);

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023**

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

1. Pendapatan Asli Daerah	Rp.	133.293.802.546,30
2. Pendapatan Transfer	Rp.	1.474.115.542.138,00
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	Rp.	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp.	1.607.409.344.684,30

1. Belanja Operasi		
a. Belanja Pegawai	Rp.	692.749.357.106,00
b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	498.717.421.433,00
c. Belanja Bunga	Rp.	0,00

d. Belanja Subsidi	Rp.	0,00
e. Belanja Hibah	Rp.	38.757.081.087,00
f. Belanja Bantuan Sosial	Rp.	139.800.000,00
Jumlah Belanja Operasi	Rp.	1.230.363.659.626,00

2. Belanja Modal

a. Belanja Modal Tanah	Rp.	0,00
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	20.623.999.886,00
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	71.271.134.954,00
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	Rp.	94.416.627.600,00
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	12.411.741.306,00
Jumlah Belanja Modal	Rp.	198.723.503.746,00

3. Belanja Tidak Terduga	Rp.	0,00
--------------------------	-----	------

4. Belanja Transfer

a. Belanja Bagi Hasil	Rp.	5.932.428.108,00
b. Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	248.946.546.775,00
Jumlah Belanja Transfer	Rp.	254.878.974.883,00

c. Pembiayaan

1. Penerimaan	Rp.	280.040.895.750,47
2. Pengeluaran	Rp.	0,00

Jumlah Pembiayaan Netto	Rp.	280.040.895.750,47
--------------------------------	------------	---------------------------

Sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp.	203.484.102.179,77
---------------------------------------	------------	---------------------------

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5...

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 30 Agustus 2024

BUPATI INDRAGIRI HULU,

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

Diundangkan di Rengat
pada tanggal 30 Agustus 2024

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

ttd

BOYKE DAVID ELMAN SITINJAK

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024 NOMOR 20

KABUPATEN INDRAGIRI HULU
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
3	Pendapatan Pajak Daerah	53.348.955.359,00	53.359.554.855,20	(10.599.496,20)	100,02
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.002.957.000,00	3.619.501.382,00	1.383.455.618,00	72,35
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.619.174.844,00	1.306.430.140,00	312.744.704,00	80,68
6	Lain-lain PAD yang Sah	78.794.975.679,00	75.008.316.169,10	3.786.659.509,90	95,19
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	138.766.062.882,00	133.293.802.546,30	5.472.260.335,70	96,06
8					
9	PENDAPATAN TRANSFER				
10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.229.313.635.188,00	1.305.700.182.063,00	(76.386.546.875,00)	106,21
11	Pendapatan Transfer Antar Daerah	126.628.763.321,00	168.415.360.075,00	(41.786.596.754,00)	133,00
12	Jumlah Pendapatan Transfer	1.355.942.398.509,00	1.474.115.542.138,00	(118.173.143.629,00)	108,72
13					
14	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH				
15	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
19					
20	JUMLAH PENDAPATAN	1.494.708.461.391,00	1.607.409.344.684,30	(112.700.883.293,30)	107,54
21					
22	BELANJA				
23	BELANJA OPERASI				
24	Belanja Pegawai	717.639.019.262,00	692.749.357.106,00	24.889.662.156,00	96,53
25	Belanja Barang dan Jasa	549.105.401.529,00	498.717.421.433,00	50.387.980.096,00	90,82
26	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Belanja Hibah	38.945.861.087,00	38.757.081.087,00	188.780.000,00	99,52
29	Belanja Bantuan Sosial	141.600.000,00	139.800.000,00	1.800.000,00	98,73
30	Jumlah Belanja Operasi	1.305.831.881.878,00	1.230.363.659.626,00	75.468.222.252,00	94,22
31					
32	BELANJA MODAL				
33	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.310.116.985,00	20.623.999.886,00	686.117.099,00	96,78
35	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.768.236.125,00	71.271.134.954,00	3.497.101.171,00	95,32
36	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	99.955.964.961,00	94.416.627.600,00	5.539.337.361,00	94,46
37	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	12.423.141.677,00	12.411.741.306,00	11.400.371,00	99,91
38	Jumlah Belanja Modal	208.457.459.748,00	198.723.503.746,00	9.733.956.002,00	95,33
39		0,00	0,00	0,00	0,00
40	BELANJA TIDAK TERDUGA				
41	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Jumlah Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
43					
44	BELANJA TRANSFER				
45	Belanja Bagi Hasil	5.932.428.108,00	5.932.428.108,00	100,00	100,00
46	Belanja Bantuan Keuangan	249.337.726.048,00	248.946.546.775,00	391.179.273,00	99,84
47	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan	255.270.154.156,00	254.878.974.883,00	391.179.273,00	99,85
48	JUMLAH BELANJA	1.769.559.495.782,00	1.683.966.138.255,00	85.593.357.527,00	95,16
49					
50	SURPLUS/DEFISIT	(274.851.034.391,00)	(76.556.793.570,70)		
51					

No	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	Rp	%
52	PEMBIAYAAN				
53	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
54	Penggunaan SILPA	274.851.034.391,00	279.976.852.802,47	(5.125.818.411,47)	101,86
55	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	64.042.948,00	(64.042.948,00)	0,00
59	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	274.851.034.391,00	280.040.895.750,47	(5.189.861.359,47)	101,89
61					
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
63	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Pembiayaan NETTO	274.851.034.391,00	280.040.895.750,47	0,00	0,00
70					
71	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	203.484.102.179,77	0,00	0,00

Salinan sesuai dengan aslinya



BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

REZITA MEYLANI YOPI

KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Organisasi : 1.01.2.22.0.00.02.0000 - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (berkurang)		Dasar Hukum	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Rp.	%		
4	PENDAPATAN DAERAH	0.00	0.00	0.00	0.00		
5	BELANJA DAERAH	519,497,934,782.00	503,201,984,550.00	16,295,950,232.00	96.86		
1.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	339,993,287,544.00	330,372,698,925.00	9,620,588,619.00	97.17		
1.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	331,652,258,137.00	322,854,535,381.00	8,797,722,756.00	97.35		
1.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	331,652,258,137.00	322,854,535,381.00	8,797,722,756.00	97.35		
1.01.01.2.02.01.51	BELANJA-OPERASI	331,652,258,137.00	322,854,535,381.00	(8,797,722,756.00)	97.35		
1.01.01.2.02.01.5101	Belanja Pegawai	331,652,258,137.00	322,854,535,381.00	(8,797,722,756.00)	97.35		
1.01.01.2.02.01.510101	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	195,639,846,758.00	193,158,297,057.00	(2,481,549,701.00)	98.73		
1.01.01.2.02.01.51010101	Belanja Gaji Pokok ASN	146,059,479,720.00	144,617,846,754.00	(1,441,632,966.00)	99.01		
1.01.01.2.02.01.5101010001	Belanja Gaji Pokok PNS	131,924,848,845.00	130,802,107,654.00	(1,122,741,191.00)	99.15		
1.01.01.2.02.01.510101010002	Belanja Gaji Pokok PPPK	14,134,630,875.00	13,815,739,100.00	(318,891,775.00)	97.74		
1.01.01.2.02.01.51010102	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	14,893,751,674.00	14,558,899,504.00	(334,852,170.00)	97.75		
1.01.01.2.02.01.510101020001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	13,362,622,364.00	13,107,502,398.00	(255,119,966.00)	98.09		
1.01.01.2.02.01.510101020002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	1,531,129,310.00	1,451,397,106.00	(79,732,204.00)	94.79		
1.01.01.2.02.01.51010103	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	221,130,000.00	163,170,000.00	(57,960,000.00)	73.79		
1.01.01.2.02.01.510101030001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	221,130,000.00	163,170,000.00	(57,960,000.00)	73.79		
1.01.01.2.02.01.51010104	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	11,662,877,000.00	11,588,208,660.00	(74,668,340.00)	99.36		
1.01.01.2.02.01.510101040001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	10,768,772,000.00	10,727,588,660.00	(41,183,340.00)	99.62		
1.01.01.2.02.01.510101040002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	894,105,000.00	860,620,000.00	(33,485,000.00)	96.25		
1.01.01.2.02.01.51010105	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	1,228,920,000.00	1,078,705,000.00	(150,215,000.00)	87.78		

Kode Rekening	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah/ (berkurang)		Dasar Hukum	Keterangan
		Anggaran	Realisasi	Rp.	%		
8.01.06.2.01.06.510202040132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2,250,000.00	750,000.00	(1,500,000.00)	33.33		
8.01.06.2.01.06.51020205	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2,250,000.00	500,000.00	(1,750,000.00)	22.22		
8.01.06.2.01.06.510202050009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2,250,000.00	500,000.00	(1,750,000.00)	22.22		
8.01.06.2.01.06.510204	Belana Perjalanan Dinas	127,394,000.00	13,632,840.00	(113,761,160.00)	10.70		
8.01.06.2.01.06.51020401	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	127,394,000.00	13,632,840.00	(113,761,160.00)	10.70		
8.01.06.2.01.06.510204010001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	127,394,000.00	13,632,840.00	(113,761,160.00)	10.70		
8.01.06.2.01.06.510204010003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0.00	0.00	0.00	0.00		
	SURPLUS/DEFISIT	(32,728,511,282.00)	(31,236,429,404.00)	(1,492,081,878.00)	95.44		

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BAGIAN HUKUM

—

BUPATI INDRAGIRI HULU

ttd

REZITA MEYLANI YOPi



NIP. 154000000 1 005